

HAK-HAK KONSUMEN DALAM BINGKAI HAK ASASI MANUSIA

Desi Apriani, S.H.,M.H
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Jl. Kaharudi Nasution, Nomor 113 Pekanbaru
Email :desiapriani@law.uir.ac.id

A. Pendahuluan

Isu dan permasalahan yang dihadapi konsumen merupakan hal yang selalu menarik dibahas dan dibicarakan terlebih di zaman globalisasi saat ini. Kehidupan yang serba kompleks, kebutuhan dan keinginan yang semakin meningkat menyebabkan sifat masyarakat semakin konsumtif dan bergantung pada produk barang maupun jasa yang tersedia di pasar. Namun di sisi lain, pada era modern yang ditandai dengan pesatnya arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini konsumen cenderung terombang-ambing bahkan seringkali menjadi korban di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak

hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji ulang.¹

Belum lekang di ingatan kasus biskuit beracun, boraks, formalin, mercury dan berbagai zat berbahaya lainnya yang dicampukan dalam berbagai produk oleh pelaku usaha yang berakibat kerugian tidak terhingga diderita konsumen. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengungkapkan sejak 1973 hingga 1990 mereka sedikitnya menerima 81 pengaduan pertahun, dimana pada tahun 1990 saja YLKI menerima sebanyak 583 pengaduan, 1.301 di tahun 2000 dimana Telepon menempati pengaduan yang paling banyak, disusul perumahan, listrik, bank dan transportasi.² Tentunya semakin berkembangnya kebutuhan dan semakin kompleksnya kegiatan pasar, angka kerugian dan pengaduan konsumen mengalami peningkatan. Di sinilah pentingnya kehadiran peraturan yang memberi perlindungan terhadap konsumen.

Dalam kehidupan alam bernegara di Indonesia, peraturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan diperingati selanjutnya sebagai hari konsumen nasional (HARKONAS). Meskipun upaya untuk lahirnya peraturan yang melindungi konsumen telah dimulai dari semenjak lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, namun ternyata pemicu utama lahirnya undang-undang ini adalah karena kuatnya tekanan dari dunia

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 3.

² NHT Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 2-5

internasional, dimana Indonesia diharuskan untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima secara luas oleh negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*).

Perlindungan konsumen berarti upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Dalam hal ini, yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen adalah hak-hak dari konsumen tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen negara melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas hak-hak konsumen sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945.

B. Pembahasan

Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi dimana untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar melindungi fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak.⁴

Secara umum, terdapat 4 hak konsumen yang diakui secara internasional yaitu :⁵

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.

³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁴ M. Shidqon Prabowo, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, PT. Refika Aditama, Bnadung, 2017, hlm. 244

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006, hlm. 19

Sementara itu, di dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang Perlindungan Konsumen, dirumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi yaitu :⁶

- a. “Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial konsumen;
- c. Pendidikan konsumen;
- d. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- e. Kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka”.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai negara telah memiliki undang-undang yang melindungi konsumen semenjak tahun 1999. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mendukung tumbuhnya dunia usaha tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, meningkatkan harkat dan martabat konsumen, melindungi kepentingan konsumen merupakan alasan utama lahirnya undang-undang tersebut.⁷ Alasan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen ini berkaitan pula dengan tujuan diundangkannya undang-undang tersebut yaitu:⁸

- a. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

⁷ Lihat Konsiderans “menimbang”, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa , kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen”.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia telah mengatur hal-hal yang menjadi hak konsumen yang harus dilindungi yaitu :⁹

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya”.

Hak-hak yang telah dibentuk dan dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan atau jasa sehingga dapat terciptanya perekonomian yang sehat tanpa

⁹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menimbulkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.¹⁰

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹¹

Pengertian Hak Asasi pada mulanya dikembangkan oleh aliran filsafat liberal yang bercorak individualistik. Mereka mempunyai pandangan bahwa manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak-hak dasar, yaitu hak-hak yang mendasari kehidupan seseorang sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat. Namun dewasa ini HAM tidak dipahami sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme, melainkan sebagai hak-hak manusiawi yang melekat dengan harkat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, status sosial, dan sebagainya.¹²

Menurut Janaus Sidabolak, pada dasarnya hak manusia bersumber dari 3 hal. *Pertama*, bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT, dimana manusia mempunyai sejumlah hak untuk mempertahankan kemanusiaannya, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya dimana hak inilah yang disebut dengan hak asasi. *Kedua* hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai

¹⁰ M. Shidqon Prabowo, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, op.cit, hlm. 246

¹¹ Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, op.Cit, hlm. 251

¹² Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 74

warga negara. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum atau hak dalam arti yuridis seperti hak politik, hak mendirikan bangunan dan lain sebagainya. *Ketiga*, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain melalui kontrak atau perjanjian.¹³

Dapat dipahami bahwa hak-hak konsumen terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang), dan hak-hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dengan pelaku usaha).¹⁴ Kesemua hak tersebut telah sedemikian rupa terangkum dalam butir-butir hak konsumen yang harus dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Sebenarnya, HAM (Hak Asasi Manusia) muncul bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri.¹⁵ Menurut pendapat Gewirth, Shue, Plant, Lesser, Hak Asasi yakni hak terhadap kondisi tertentu yang diperlukan bagi segala tindakan manusia. Hak-hak tersebut merupakan prakondisi yang memungkinkan terwujudnya hak-hak yang lain. Hak dasar itu adalah hak untuk hidup sebagai hak untuk tidak dibunuh.¹⁶

Hak untuk hidup sebagai hak dasar ini tentunya tidak berdiri sendiri dan terpisah dengan hak dasar yang lain. Melainkan bersifat saling berkaitan dan saling mendukung dengan hak dasar yang lainnya sehingga diperlukan perluasan pemahaman tentang hak asasi manusia tersebut. Hak untuk hidup sebagai hak

¹³ Janus Sidabolak sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyani, hlm. 251

¹⁴ Ibid, 253

¹⁵ Dodi Harjono, dalam Buku Bunga Rampai, *Demokrasi HAM dan Negara Hukum (Kumpulan Tulisan sebagai Penghormatan Bersempena dengan Pengukuhan Jabatan Guru Besar Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum)*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 3

¹⁶ George J. Andreopoulos & Richard P. Claude, sebagaimana dikutip oleh Dodi Harjono, *ibid*, hlm. 9

dasar, memerlukan hak-hak yang lain sebagai penunjang dan penjaminnya. Dengan demikian kita harus memahami bahwa Hak asasi manusia sebenarnya lebih dari sekedar hak dasar.

Manusia akan kehilangan hak untuk hidupnya apabila tidak diberikan perlindungan terhadap keselamatan dirinya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, Hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia sejatinya harus didukung oleh hak-hak yang lain seperti hak atas kenyamanan, hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk didengar, hak untuk dilindungi dan hak-hak pendukung lainnya. Hal ini karena manusia berhak untuk hidup dan manusia berhak untuk menjalani hidupnya tersebut. Hak-hak asasi manusia ini tentunya harus mengalami perluasan makna terlebih di tengah pesatnya perkembangan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berkaitan dengan itu pula bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷ Rumusan hak untuk hidup ini baru akan dapat terpenuhi secara layak, apabila hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga terpenuhi.

¹⁷ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-hak konsumen merupakan generasi keempat dari perkembangan HAM di dunia. Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada empat faktor yang fenomenal sekaligus mempengaruhi lahirnya konsepsi generasi HAM ke-empat yaitu:¹⁸

1. Konglomerasi raksasa dalam bentuk *Multinational Corporations* (MNCs) atau disebut juga *Transnational Corporations* (TNCs);
2. Fenomena *Nation Without States*;
3. *Global Citizen* yang berimplikasi lahirnya kelas sosial tersendiri; dan
4. Pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk *corporate federalism*.

Secara konstitusional, permasalahan Hak Asasi Manusia ini telah sedemikian rupa tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta sekaligus memberi perluasan materi Hak Asasi Manusia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diubah.¹⁹

Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang semakin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 27-28

¹⁹ Lihat Majelis Permusyawaratan rakyat Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 175-176

hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.²⁰

Berikut ini penulis sajikan Pasal-Pasal UUD 1945 hasil amandemen tentang Hak asasi manusia yang sekaligus membingkai hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perlindungan konsumen Indonesia:

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 C ayat (1) & (2)

- (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

28 D ayat (1)

- (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 G ayat (1)

- (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 diatas, sangat mendukung terlaksananya segala upaya untuk melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan hak-hak yang sangat penting untuk dijamin dan dapat disebut sebagai dimensi baru dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

²⁰ Majelis Permusyawaratan rakyat, *Ibid*, hlm. 180

Berkaitan dengan hak konsumen diatas, meskipun undang-undang perlindungan konsumen merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, namun tentunya konsumen tidak boleh melupakan kewajibannya. Setiap orang yang mempunyai hak, maka di sisi lain kewajiban juga akan menyertai hak tersebut. Kewajiban konsumen tersebut adalah:

- a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut”.

Hak Asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya.²¹

Jadi antara hak dengan kewajiban, memiliki hubungan timbal balik sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak

²¹ Majda Elmuhtaj, *Op. Cit*, hlm. 31

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.²²

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak-hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan sebaliknya kewajiban konsumen, merupakan hak yang harus diperoleh oleh pelaku usaha. Adapun hak dari pelaku usaha yang merupakan kewajiban konsumen tersebut adalah :

- a. “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selain mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, konsumen juga harus mengetahui dan memahami hak-hak pelaku usaha yang menjadi kewajiban konsumen. kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk barang maupun jasa tidak selamanya disebabkan oleh pelaku usaha, tetapi dapat pula disebabkan oleh kelalain konsumen sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu “menjadi konsumen yang cerdas” merupakan slogan yang sangat tepat untuk dapat diterapkan oleh masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai konsumen.

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Penutup

Hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa, merupakan bagian dari hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang harus dilindungi. Namun hak-hak konsumen tersebut tidak akan dapat terlaksana atau ditegakkan apabila konsumen tidak melaksanakan kewajibannya. Seharusnya konsumen memiliki kesadaran yang lebih untuk mempertahankan hak-haknya serta menyadari kewajiban-kewajibannya dan yang lebih penting menjadi “konsumen yang cerdas”, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya kerugian.

D. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

Husnu Abadi dkk, Buku Bunga Rampai, *Demokrasi HAM dan Negara Hukum (Kumpulan Tulisan sebagai Penghormatan Bersempena dengan Pengukuhan Jabatan Guru Besar Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum)*, UIR Press, Pekanbaru

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Majelis Permusyawaratan rakyat Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012

Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018

NHT Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005

Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, PT. Refika Aditama, Bnadung, 2017

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia